

## PROSES PENDIRIAN PT

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU no 40 /2007

1. Pendiri minimal 2 orang atau lebih ( pasal 7)
2. Akta notaris berbahasa Indonesia
3. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (ps 7 ayat 2 dan 3)
4. Akta pendirian harus disahkan oleh menteri kehakiman dan di umumkan dalam WNRI ( ps 7 ayat 4)
5. Modal dasar minimal Rp 50jt dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (ps 32, ps 33)
6. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps 92 ayat 3 dan ps 108 ayat 3)
7. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, Kecuali PT PMA

Syarat material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada notarisnya pada suatu penandatanganan akta pendirian adalah :

1. KTP dari para pendiri ( minimal 2 orang dan bukan suami istri)  
Kalau pendirinya suami istri (dan tidak pisah harta ), maka harus ada satu orang lagi yang bertindak sebagai pendiri atau pemegang saham.
2. Modal dasar dan modal disetor.  
Untuk menentukan besarnya modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor ada strateginya. Karena semua itu tergantung pada jenis / kelas SIUP yang diinginkan. Penentuan kelas SIUP bukan berdasarkan modal melainkan berdasarkan besarnya modal disetor ke kas perseroan. Kriterianya adalah:
  - a. SIUP kecil modal disetor s/d Rp 200jt
  - b. SIUP menengah modal disetor Rp 201jt s/d Rp 500jt
  - c. SIUP besar modal disetor maksimum sampai > Rp 500jt.

Besarnya modal disetor maksimum sampai dengan 50% dari modal dasar untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan apabila sewaktu-waktu akan mengeluarkan saham dalam simpanan. Namun demikian boleh juga modal dasar = modal disetor.

- Jumlah saham yang diambil oleh masing2 pendiri (presentasenya) misalnya A 25%, B 50%, C 25%.
- Susunan direksi dan komisaris serta jumlah dewan direksi dan dewan komisaris.

Untuk ijin2 perusahaan berupa surat keterangan domisili perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP, TDP/WDP dan KPK maka dokumen2 pelengkap yang diperlukan adalah:

1. Kartu keluarga direktur utama
2. NPWP direksi (kalau tidak ada minimal direktur utama)
3. Copy perjanjian sewa gedung berikut surat keterangan domisili dari pengelola gedung (apabila kantor berstatus sewa)  
Apabila kantor berstatus milik sendiri dibutuhkan:

- Copy sertifikat tanah
  - Copy PBB terakhir berikut bukti lunasnya
4. Pas photo direktur utama atau penanggung jawab ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
  5. Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruang berisi meja, kursi, computer beserta 1-2 orang pegawainya)
  6. Stempel Perusahaan.

#### PENDIRIAN PT menurut praktisi (konsultan)

Tahap proses pendirian PT:

Tahap 1. Pengecekan & pendaftaran nama perseroan

Tahap 2. Pembuatan akta pendirian PT

Tahap 3. Surat keterangan domisili perusahaan

Tahap 4. NPWP – Nomor pokok wajib pajak

Tahap 5. Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM RI

Tahap 6. UUG / SITU – Surat Izin Tempat Usaha

Tahap 7. SIUP – Surat Izin Usaha Perdagangan.

Tahap 8. TDP – Tanda Daftar Perusahaan

Penjelasan:

Tahap 1. Pengecekan & pendaftaran nama perseroan

1. Permohonan diajukan kepada notaris.
2. Pengecekan nama perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah nama perseroan yang dipilih sudah dipesan / digunakan pihak lain atau belum. Jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh notaris melalui SISMINBAKUM untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI
3. Jika nama perseroan sudah dimiliki maka harus mengganti nama yang lain .

Lama proses:

- ✓ Cek dan pendaftaran nama perusahaan 1 hari kerja
- ✓ Persetujuan pemakaian nama perseroan terbatas 4 hari kerja.

Tahap 2. Pembuatan akta pendirian PT

Setelah mendapatkan kepastian mengenai pemakaian nama PT kemudian dibuat draft / Minuta Anggaran Dasar Perseroan yang sama isinya dengan Akta Pendirian oleh kantor notaris untuk ditandatangani oleh para pendiri perusahaan atau kuasanya. Disini para pendiri / kuasa dapat memeriksa kembali dan atau melakukan perbaikan / penambahan isi anggaran dasar sebelum akta pendirian dibuat.

Jika minuta anggaran dasar perseroan ditandatangani oleh para pendiri atau kuasanya kemudian Akta Pendirian Perseroan Terbatas dibuat dan ditandatangani oleh Notaris.

Dokumen :

- a) Fotocopy KTP para pendiri

- b) Fotocopy KTP pengurus
- c) Data pendiri perusahaan

Lama proses :

- ✓ Draft dan penandatanganan minuta akta pendirian PT 1 hari kerja
- ✓ Akta Pendirian PT 1 hari kerja

Tahap 3. Surat keterangan domisili perusahaan

Permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan diajukan kepada kepala kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada sebagai bukti keterangan / keberadaan alamat perusahaan.

Persyaratan lain yang dibutuhkan:

- Fotocopy kontrak / sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha
- Surat keterangan dari pemilik gedung apabila berdomisili digedung perkantoran / pertokoan
- Fotocopy PBB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di ruko/rukan

Lama proses:

- 2 hari kerja setelah permohonan diajukan

Tahap 4. NPWP – Nomor pokok wajib pajak

Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak badan usaha diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan untuk mendapatkan: Kartu NPWP dan Surat Keterangan terdaftar sebagai wajib pajak.

Persyaratan:

- Melampirkan bukti PPn atas sewa gedung
- Melampirkan bukti pelunasan PBB
- Melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa/ kontrak tempat usaha

Lama proses:

- 2 hari kerja setelah permohonan diajukan.

Tahap 5. Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM RI

Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Akta Pendirian) sebagai badan hukum PT. sesuai UU no 40 th 2007 tentang Perseroan terbatas.

Persyaratan lain yang dibutuhkan:

- Melampirkan surat pernyataan penyetoran modal yang ditandatangani oleh para pendiri perseroan
- Melampirkan NPWP

Lama proses:

- ✓ 10 hari kerja hingga 30 hari kerja setelah permohonan diajukan.

Tahap 6. UUG / SITU – Surat Izin Tempat Usaha

Tahap 7. SIUP – Surat Izin Usaha Perdagangan.

Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan kota/kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil, dan atau Dinas Perdagangan provinsi untuk SIUP besar sesuai tempat kedudukan perusahaan.

Lama proses :

- ✓ 10 hari kerja setelah permohonan diajukan

Tahap 8. TDP – Tanda Daftar Perusahaan

Permohonan pendaftaran diajukan kepada kantor Pendaftaran Perusahaan yang berada di kota/ kabupaten dalam Dinas Perdagangan.

Lama proses :

- ✓ 10 hari kerja setelah permohonan diajukan

Tahap 9. Pengumuman Dalam berita negara dan Tambahan Berita negara RI

Perusahaan yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia maka statusnya sebagai badan hukum telah SEMPURNA. Permohonan ini dapat diajukan setelah perusahaan memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI.

Lama proses :

- ✓ 60 – 90 hari kerja

❖ Syarat pendirian PT

- a) Mengisi formulir pendirian PT
- b) Mempersiapkan 2 nama PT sebagai alternative
- c) Melampirkan fotocopy KTP para pendiri perseroan
- d) Melampirkan fotocopy KTP para pengurus ( direksi dan komisaris)
- e) Melampirkan fotocopy KK pimpinan perusahaan
- f) Melampirkan fotocopy surat kontrak / sewa atau PBB tahun terakhir
- g) Melampirkan fotocopy surat keterangan dari pemilik gedung jika berada di gedung perkantoran
- h) Melampirkan fotocopy SITU berdasarkan UU gangguan untuk kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya SITU.